

I Wayan Eva Mudana¹
Purbadharma²

PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Abstrak

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali meningkat, disparitas pendapatan masih terjadi. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila tercipta kesempatan kerja yang layak dan mampu memberikan pendapatan yang dapat menjamin kehidupan para pekerja dan keluarga untuk memenuhi kualitas hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh langsung upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh langsung upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis apakah upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah titik pengamatan 90 titik pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. (2) Upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Upah minimum berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata Kunci: Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

Economic development aims to improve people's welfare, which is reflected in the increase in the Human Development Index (HDI). Although HDI in Bali Province is increasing, income disparity still occurs. Community welfare can be achieved if decent work opportunities are created and are able to provide income that can ensure the lives of workers and families to meet their quality of life. The purpose of this study is (1) To analyze the direct effect of minimum wage and economic growth on the inequality of income distribution of districts / cities in Bali Province. (2) To analyze the direct effect of minimum wage, economic growth and income distribution inequality on the welfare of the people of districts / cities in Bali Province. (3) To analyze whether the minimum wage and economic growth have an indirect effect on people's welfare through inequality of income distribution. The data used is secondary data, with a number of observation points of 90 observation points. The analysis technique used is the path analysis technique. The results showed that (1) The minimum wage has a negative and significant effect on the inequality of opinion distribution, while economic growth has a negative and insignificant effect on the inequality of opinion distribution. (2) Minimum wage and economic growth have a positive and significant effect on people's welfare. Inequality of

^{1,2)} Sarjana Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana
email: mudana1414@gmail.com

income distribution has a negative and significant effect on people's welfare. (3) The minimum wage has an indirect effect on people's welfare through inequality of income distribution, while economic growth does not indirectly affect people's welfare through inequality of income distribution.

Keywords: Minimum Wage, Economic Growth, Inequality Of Income Distribution, Public Welfare.

PENDAHULUAN

Permasalahan besar yang umumnya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah rendahnya pembangunan manusia, kesejahteraan, dan terjadinya kesenjangan ekonomi, atau ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Sanjaya & Saskara, 2022). Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup (level of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self esteem) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta meningkatkan kebebasan (freedom) setiap orang dalam memilih berbagai variabel pilihan yang ada (Citrawan et al., 2018).

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan masih banyak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah mempengaruhi pendapatan yang dapat dihasilkan setiap daerah sehingga antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Daerah dengan sumber daya dan faktor produksi, terutama barang modal, akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit (Sanjaya & Saskara, 2022). Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa yang merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, negara berkembang harus mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam segala bidang pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, di samping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Aditia dan Dewi, 2018). Ide dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kualitas kehidupan manusia (Sulistiyowati et al., 2017). Menurut Vivian Angela & Sri Budhi (2019) pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment).

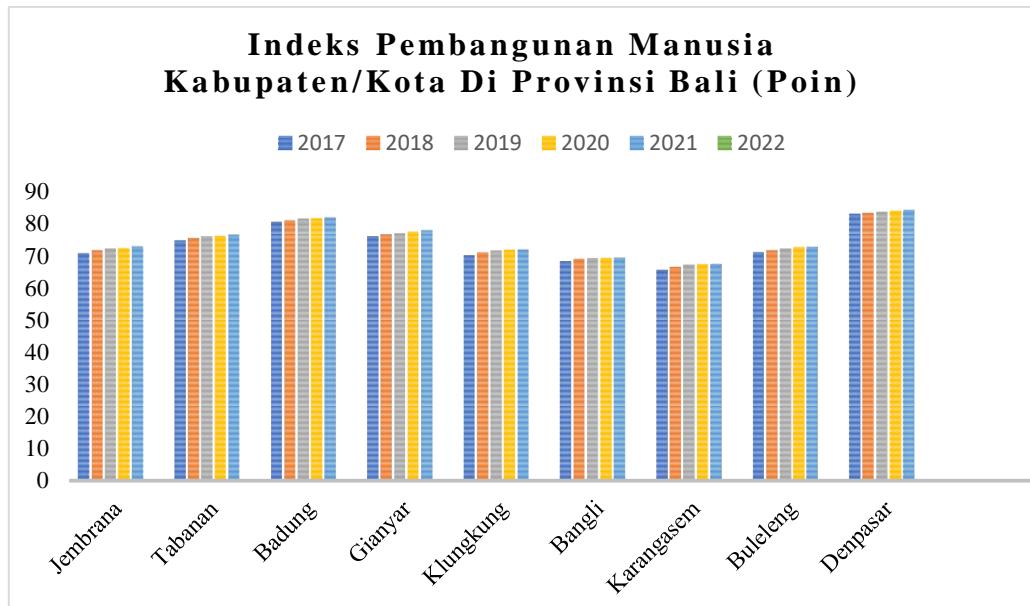
Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Mulia & Saputra, 2020). Kemajuan pembangunan apabila diiringi dengan partisipasi masyarakat yang produktif dapat memajukan perekonomian daerah dan tingkat kesejahteraan. Masyarakat diharapkan bukan menjadi obyek pembangunan tetapi dapat menjadi subyek pembangunan agar masyarakat dapat menerima kontribusi yang bermanfaat di suatu wilayah secara makro sehingga dapat memajukan suatu negara (Diba et al., 2020).

United Nations Development Program (UNDP) untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk 175 negara. Indikator tersebut dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Lamanele et al., 2024). Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara ataupun antardaerah (Todaro, 2009:57). Kesejahteraan

Masyarakat dapat dilihat dari IPM, karena IPM merupakan indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut BPS (2023) komponen-komponen tersebut, yaitu umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Ketiga komponen tersebut merupakan dimensi penting dari kesejahteraan masyarakat. Umur panjang dan sehat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk hidup lebih lama dan sehat. Pengetahuan menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan pendidikan. Kehidupan yang layak menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara (F. Ismail et al., 2021).

Pada tahun 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun 2022 tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan tahun 2021. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 tahun atau lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021. Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 tahun, dari 9,06 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,39 tahun pada tahun 2022 (BPS, 2023).

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,94 juta rupiah per tahun atau meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021 (BPS, 2023). IPM secara rata-rata yang terdapat pada Provinsi Bali menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (poin)

Gambar 1. menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2022 ini menunjukkan bahwa kesejahteraan

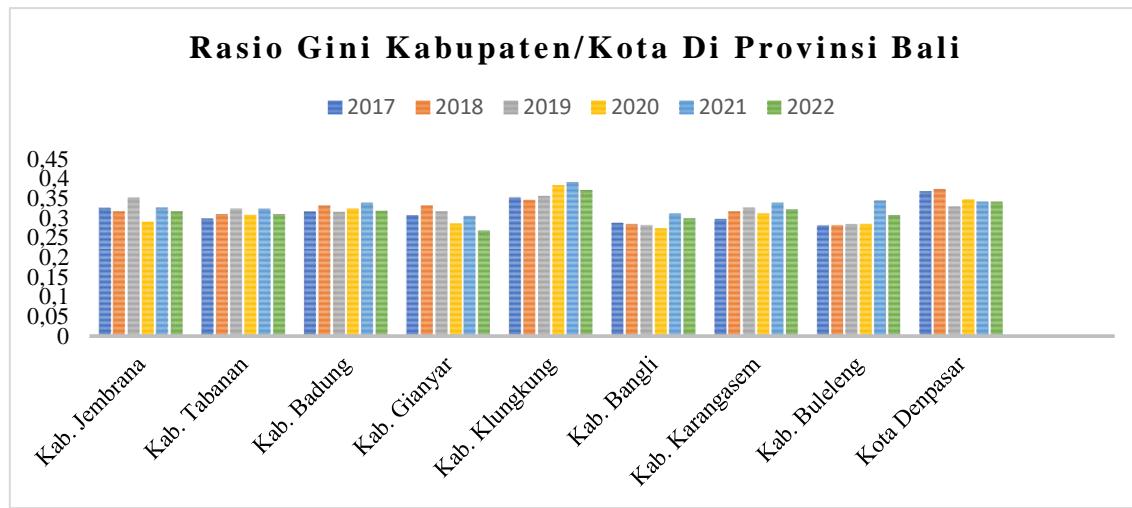
masyarakat di Provinsi Bali meningkat. Pada tahun 2017 IPM Provinsi Bali mencapai 74,3 poin dan meningkat menjadi 76,44 poin di tahun 2022. Berdasarkan data di atas, IPM Kota Denpasar merupakan peringkat nomor 1 tertinggi dari 9 kabupaten/kota yakni hanya sebesar 84,37 poin pada tahun 2022. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Karangasem sebesar 68,28 poin pada tahun 2022. Kesejahteraan masyarakat sepenuhnya belum merata. Masih banyak masyarakat yang belum sejahtera, baik secara ekonomi maupun sosial. Kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari IPM, tetapi juga dari ketimpangan pendapatan.

Salah satu mekanisme untuk mengurangi ketimpangan adalah berupaya meningkatkan modal manusia sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di masa depan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah didefinisikan sebagai proses dalam menjalani hidup yang panjang dan sehat untuk dididik dan menikmati standar hidup yang layak. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Pramesti et al., 2022). Konsep kesejahteraan masyarakat memandang manusia tidak hanya sebagai individu dan bukan semata-mata alat kepentingan kolektiva, tetapi juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Konsep dan teori kesejahteraan masyarakat adalah negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Ketimpangan pendapatan merupakan perbandingan pendapatan yang relatif antara warga negara berpendapatan tinggi dengan rendah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal (Pradnyadewi & Purbadharma, 2017). Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi pada semua negara (negara maju dan negara berkembang (Dewi et al., 2019). Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai distribusi yang tidak proporsional pada pendapatan nasional total diberbagai rumah tangga suatu negara (Istikharoh et al., 2020). Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda yang berakibat pada perbandingan pendapatan yang cukup besar antara golongan kaya dan golongan miskin. Ketimpangan pada kenyataannya menjadi masalah dalam pembangunan manusia serta tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja.

Ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Selain memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004:235).

Di Provinsi Bali sendiri masalah pemerataan pendapatan masih sering dibahas dan menjadi topik yang sangat menarik. Menurut Badan Pusat Statistik kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2017 hingga tahun 2022 indeks rasio gini bergerak secara fluktuatif. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih cukup tinggi. Rasio gini yang terdapat pada Provinsi Bali menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023
 Gambar 2. Rasio Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Dari Gambar 1. di atas dapat diketahui bahwa angka rasio gini kabupaten/kota di Provinsi Bali bergerak secara fluktuatif selama beberapa tahun tersebut sehingga harus terus diusahakan agar ketimpangan yang terjadi sebisa mungkin tidak terlalu tajam. Rasio Gini diukur antara 0 dan 1. Jika rasio pendapatan rata-rata rumah tangga terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga mendekati satu, maka disparitas pendapatan semakin besar. Namun, jika mendekati nol, pendapatan didistribusikan lebih merata atau hampir merata di seluruh rumah tangga (Astuti & Hukom, 2023). Ketimpangan dianggap rendah jika rasio gini kurang dari 0,3, jika skornya lebih dari 0,5 dianggap tinggi, dan jika antara 0,3 dan 0,5 dianggap sedang (BPS, 2023). Berdasarkan statistik di atas, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih memiliki koefisien gini sebesar 0,3 atau lebih, yang menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Bali termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak merata di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Menurut Suryono (2000:5), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang. Sehingga diperlukan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan karena pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan per kapita diharapkan bisa merata sehingga dapat dinikmati penduduk secara keseluruhan dan akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Nilasari & Amelia, 2022). Menurut Wenagama (2020), pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis yang merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan pembangunan yang semakin maju, peranan dan kemampuan daerah terus diusahakan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat (Pramesti et al., 2022).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam setiap negara adalah pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat dimaknai adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Febriyani & Anis, 2022). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penerimaan atau pendapatan masyarakat dalam jangka

waktu tertentu. Semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga akan meningkat (Yantri & Sutrisna, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Produk Domestik Bruto per kapita (PDB perkapita). Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di semua wilayah selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Menurunnya PDRB menimbulkan ketidakpastian bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) data PDRB dapat diperoleh dengan tiga cara: metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu wilayah. Suatu masyarakat akan dianggap lebih sejahtera jika pendapatan perkapita atas dasar harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus meningkat. Menurut Afifi, (2019) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran serta kesenjangan pendapatan masyarakat dibutuhkan berbagai usaha diantaranya dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan perbedaan pendapatan yang akan mempengaruhi perekonomian. Untuk itu ada banyak faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di antaranya, upah minimum yang merupakan dasar pada kebutuhan hidup layak (Rahman & Putri, 2021). Menurut Sumarsono (2009: 181) Upah diartikan sebagai penerimaan imbalan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dan sistem pembayarannya sesuai dengan kesepakatan awal atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah minimum dapat menjadi faktor yang berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan (Istikharoh et al., 2022). Upah minimum merupakan standar minimum upah yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil mereka bekerja di suatu lapangan pekerjaan dan upah minimum ini yang menjadi acuan para pemilik perusahaan atau pemilik usaha untuk membayar para pekerjanya. Upah minimum disetiap daerah memiliki tingkat upah yang berbeda-beda (Fanshuri & Saputra, 2022)

Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, upah minimum juga merupakan alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Siregar et al., 2023). Upah minimum adalah salah satu komponen yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Hal ini karena upah minimum merupakan pendapatan minimal yang diterima oleh pekerja, sehingga dapat menjadi indikator kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan upah minimum akan meningkat kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan.

Kebijakan upah minimum sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Bagi pihak pekerja, tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat. Upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan insentif bagi pekerja yang lebih keras, dengan demikian upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Arthur et al., 2018). Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Produk Domestik Bruto per kapita (PDB perkapita). Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di semua wilayah selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Menurunnya PDRB menimbulkan ketidakpastian bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) data PDRB dapat diperoleh dengan tiga cara: metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu

indikator kemakmuran penduduk suatu wilayah. Suatu masyarakat akan dianggap lebih sejahtera jika pendapatan perkapita atas dasar harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus meningkat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Provinsi Bali.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum (X_1) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan bernilai negatif sebesar $-319E-08$ dengan nilai signifikansi sebesar $(0,0000) < 0,05$ yang berarti (H_1) diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Bali berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sanjaya & Saskara (2022), bahwa upah minimum berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari et al. (2019), bahwa UMP pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh program pemerintah yang sengaja menetapkan tingkat upah yang berbeda untuk mencegah ketimpangan pendapatan di daerah-daerah. Program ini diharapkan dapat mengurangi disparitas pendapatan antara pekerja, yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Upah merupakan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga, dan menjadi faktor utama yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Peningkatan upah minimum regional memiliki potensi untuk mengurangi arus migrasi, terutama dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah (Anshari et al., 2019). Hal ini berimplikasi pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Teori tentang migrasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, termasuk tingkat upah, menunjukkan bahwa kenaikan upah dapat mendorong sebagian besar tenaga kerja berpenghasilan rendah dan menengah untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Sesuai dengan penelitian Firdaus & Hasmarini (2023), bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai negatif artinya ketika UMK naik maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan hal ini terjadi karena upah minimum memang sudah menjadi salah satu alat untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan. Upah minimum tidak hanya berarti sebuah batas terendah dari upah secara umum tetapi juga dapat mempengaruhi kenaikan pendapatan serta memberikan dampak dalam pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sesuai dengan penelitian Fanshuri et al. (2022), bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kenaikan upah minimum juga dapat memperbesar ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Hal ini terjadi apabila kenaikan upah minimum secara signifikan hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya tidak mengalami peningkatan serupa.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_2) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil pengujian memperoleh

nilai koefisien beta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan bernilai negatif sebesar $-0,000553$ dengan nilai signifikansi sebesar $(0,4205) < 0,05$ yang berarti (H_0) diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Peningkatan atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak secara konsisten diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Febriyani & Anis (2021), bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Ini mengarah pada situasi di mana ekonomi suatu negara tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak mempengaruhi distribusi pendapatan secara substansial. Sesuai dengan penelitian Arafah & Khoirudin (2022), bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini bisa terjadi jika manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan mayoritas masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sama (Papilaya et al., 2024). Pemerintah terus merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, redistribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan yang merata. Hal ini bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata, berarti tidak hanya memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk distribusi pendapatan, akses terhadap sumber daya, kesetaraan kesempatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada 1955. Dari hasil penelitiannya, Simon Kuznets melahirkan sebuah gagasan baru bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya ketimpangan ekonomi. Teori Kurva Kuznets menyampaikan bahwa dalam jangka pendek menggambarkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa ketika ekonomi tumbuh, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini berubah menjadi negatif, yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesenjangan antara pendapatan yang tinggi dan rendah, seiring berjalanannya waktu, efek redistribusi atau faktor-faktor lainnya dapat mengurangi ketimpangan tersebut sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pengaruh Upah Minimum (X_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat bernilai positif sebesar $3,16E-06$ dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ yang berarti (H_0) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya, peningkatan upah minimum di Bali berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahendra & Arka (2018), bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Upah (wage) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Pemerintah telah aktif terlibat dalam menangani permasalahan pengupahan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 ayat 1 dari Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak atas penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai alat jaring

pengaman sosial untuk menjamin kestabilan upah dan mengurangi disparitas ekonomi. Besaran upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja, termasuk sandang, pangan, dan kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian yang dilakukan Guna & Yuliarmi (2021), bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya upah minimum maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sistem pengupahan adalah kerangka yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan upah agar kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dengan meningkatnya kesesuaian upah terhadap kebutuhan hidup, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, diharapkan bahwa kesejahteraan pekerja akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, sistem pengupahan berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X₂) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat bernilai positif sebesar 0,034978 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,010) < 0,05$ yang berarti (H_0) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya, peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wiriana & Kartika (2020), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh Pambudy & Syairozi (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh Pambudy & Syairozi (2019), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti melalui investasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja, serta memperluas pasar untuk produk-produk regional, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna mencapai standar hidup yang layak. Daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah diharapkan dapat memberikan prioritas pada upaya peningkatan indeks tersebut. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan aktif sektor swasta dan partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting, sambil meningkatkan transparansi dalam seluruh aspek pemerintahan.

Sejalan dengan penelitian Pramesti et al. (2022), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, potensi sumber pendapatan di dalamnya pun meningkat. Peningkatan ini berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, memungkinkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pemerataan pendapatan serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sesuai dengan penelitian Puspita Sari et al. (2020), bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Adam Smith, sebuah negara berkewajiban memberikan rasa aman bagi semua warganya dari segala macam bentuk situasi, salah satunya adalah situasi yang tidak stabil, baik secara sosial maupun politik, yang akan menyulitkan upaya mewujudkan kesejahteraan. Selain itu negara juga harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga. Pemikiran Adam Smith tersebut menegaskan, bahwa pembangunan diselenggarakan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara simultan juga berorientasi pada penciptaan kondisi sosial. Artinya, dimensi ekonomi dan sosial

merupakan dua dimensi utama yang dapat digunakan sebagai titik masuk untuk mengukur pembangunan. Nilai pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (Puspita Sari et al., 2020).

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat bernilai negatif sebesar $-4,885272$ dengan nilai signifikansi sebesar $(0,0047) < 0,05$ yang berarti (H_0) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya, semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Bali, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yasa & Arka (2015), bahwa disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelebaran ketimpangan antarwilayah di Provinsi Bali menjadi sebuah perhatian serius karena dampaknya yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, menurunnya disparitas pendapatan antardaerah diharapkan akan menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota di wilayah tersebut. Melalui upaya ini, diantisipasi bahwa terciptanya kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat untuk mengakses layanan publik yang berkualitas serta infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Bali.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagia & Utama (2022), bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Adanya perluasan disparitas pendapatan antar penerima pendapatan di setiap daerah memiliki potensi untuk menyebabkan penurunan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Sebaliknya, penurunan angka disparitas pendapatan antarwilayah dapat menciptakan kesempatan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di berbagai wilayah, yang pada gilirannya diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Upah Minimum (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.
2. Upah Minimum (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_1) berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.
3. Upah Minimum (X_1) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi (X_2) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) melalui ketimpangan distribusi pendapatan (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Afini, N. (2019). Pengaruh PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pemerataan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(2), 194-206.

Agustina, R., Lukito, W., Firmansyah, A., Suhardjo, H. N., Murniati, D., & Bindels, J. (2007). The effect of early nutritional supplementation with a mixture of probiotic, prebiotic, fiber and micronutrients in infants with acute diarrhea in Indonesia. *Asia Pacific journal of clinical nutrition*, 16(3).

Aminanda, Y., & Masbar, R. (2018). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Subsektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 794-806.

Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 90-98.

Angela, P. V., & Budhi, M. K. S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(4), 1419-1446.

Anshari, M., Azhar, Z., & ARIUSNI, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494-502.

Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 628-636.

Ardiyanti, N. L. G. M., & Suasih, N. N. R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Investasi, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 12(7), 503-517

Arthur H. Goldsmith, Jonathan R. Veuma & William Darity, Jr. (2018). The Impact of Psychological and Human Capital on Wage. *Western Economic Association International*, Vol. XXXV, 815-829, (Issn 0095-2583).

Astuti, D., & Hukom, A. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 73-84.

Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Ed.3. England: John Wiley & Sons.

Bonerri, K. B. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).

BPS. (2023). Berita Resmi Statistik (BRS) Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2023.

BPS. (2023). Berita Resmi Statistik (BRS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023.

Catri Jintar, S. E., SE, M. S. S. K., Paramita, M. S. C. B., & SE, M. S. (2023). *Ekonomi Pembangunan*. Cv. Azka Pustaka.

Citrawan I Wayan, Widana I Wayan, & Suarta I Made. (2018). Education Sector Optimization for Improving Human Development Index. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 2 No. 1, Pages: 117~133 EISSN: 2550-7001, P-ISSN: 2550-701X.

Diah Pradnyadewi, T., & Purbadharma, I. B. P. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2).

Diba, A. F. O., M. Fathomrazi, & R. P. Somaji (2020), Pengaruh Kemiskinan. PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 2(1), 10-19.

Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).

Edi Suharto, (2017). "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial". Bandung : PT Refika Aditama.

Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten Kawasan Sleingkar Wilis Periode 2010-2019). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1).

Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.

Feraliani, F., Valeriani, D., & Yusnita, M. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(1), 61-71.

Ferraro, S., Hänilane, B., & Staehr, K. (2018). Minimum wages and employment retention: A microeconometric study for Estonia. *Baltic Journal of Economics*, 18(1), 51-67.

Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 116-123.

Guna, A., & Yuliarmi, N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja dan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(9), 3769-3797.

Hartini, ermatry. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal Of Applied Business Tijab*. Volume 3 Nomer 1, Hlm. 16-23.

Herman, E. (2011). The impact of economic growth process on employment in European Union countries. *The Romanian Economic Journal*, 14(42), 47-67.

Indonesia, Republik. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Republik Indonesia.